

PENYAMPAIAN HASIL SPI TAHUN 2023 DAN PERSIAPAN SPI TAHUN 2024



Wonosari (30/4/2024), Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul menyelenggarakan Rapat koordinasi penyampaian hasil SPI Tahun 2023 dan persiapan survey penilaian integritas SPI KPK Tahun 2024. Acara dimulai pukul 09.00 WIB tepat dan dipimpin langsung oleh Inspektur, Saptoyo, S,Sos, M.Si. Acara dihadiri oleh perwakilan semua Perangkat Daerah se Kabupaten Gunungkidul. Acara dibuka langsung oleh Inspektur dengan ucapan salam, selamat datang dan terima kasih atas kehadiran peserta rapat koordinasi serta penyampaian tujuan dilaksanakan rapat koordinasi yang dilanjutkan dengan paparan kebijakan dan paparan teknis oleh Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan rakyat.

Disampaikan oleh Inspektur bahwa nilai SPI untuk Kabupaten Gunungkidul 78,12 sudah masuk kategori terjaga. Sementara rerata skor SPI Nasional seluruh K/L/PD di Indonesia 70,97.

Disampaikan lebih lanjut bahwa setiap tahun KPK mengadakan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diikuti oleh pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga di seluruh Indonesia. Selain sebagai salah satu indikator keberhasilan

pemberantasan korupsi, SPI juga telah menjadi motor penggerak perubahan di berbagai instansi tanah air.

Setiap Tahun SPI KPK menilai Pemerintah Daerah di 34 Provinsi dan 503 Kabupaten/Kota serta 94 Kementerian/Lembaga. Ada tujuh elemen pengukuran dalam SPI, yaitu transparansi, pengelolaan sumber daya manusia (SDM), pengelolaan anggaran, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (*trading in influence*), pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dan sosialisasi antikorupsi.

Lehih lanjut disampaikan bahwa SPI telah menjadi salah satu alat penting dalam mengukur keberhasilan pemberantasan korupsi, selain Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK). IPAK adalah pengukuran di tingkat individu, IPK di tingkatan negara. Sementara SPI ada di tingkat organisasi. Survei Penilaian Integritas mengambil celah yang belum tersentuh oleh IPAK atau IPK. SPI bertujuan untuk memetakan risiko korupsi, menilai pengelolaan anggaran dan mengukur efektivitas pencegahan korupsi yang dilakukan masing-masing instansi. Semakin rendah nilai SPI, menunjukkan semakin tinggi risikonya.

SPI penting untuk menciptakan kesadaran akan adanya risiko korupsi di pemerintahan, kementerian, atau lembaga. Hasil SPI yang dipublikasikan ke masyarakat juga akan mendesak dilakukannya perbaikan sistem pada organisasi agar tidak ada lagi celah korupsi. Jika nilai SPI jelek, maka di mata publik akan kurang bagus. *Naming and shaming* ini akan menciptakan tekanan untuk memperbaiki diri hingga kepada tingkatan yang dapat diterima oleh publik. SPI berhasil mengungkap temuan-temuan celah korupsi di berbagai instansi. Berbagai temuan itu akhirnya mendorong perubahan kebijakan dan regulasi. Hasil SPI juga menjadi masukan untuk menghitung nilai reformasi birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Jika nilai reformasi birokrasinya jelek, maka otomatis insentif untuk instansi tersebut juga berkurang. Mau tidak mau akhirnya akan dilakukan perbaikan di organisasinya. Di tataran pemerintahan daerah, SPI memetakan wilayah rawan korupsi dengan skala warna, dari merah (sangat rentan), kuning (rentan), biru (waspada), dan hijau (terjaga). Pemetaan SPI yang bisa diakses di situs jaga.id ini diharapkan menjadi dasar acuan pembuatan kebijakan publik terkait alokasi anggaran dan insentif pemerintah pusat terhadap daerah.

setelah dilaksanakan rapat koordinasi ini diharapkan Perangkat Daerah menindaklanjuti dengan :

1. Sosialisasi ajakan mensukseskan survei penilaian integritas tahun 2024 :

Secara Online: Di website, media sosial (twitter, instagram, facebook dll);

Secara Offline: Pemasangan barcode di tempat strategis;

2. *Mengirim data populasi paling lambat tanggal 31 mei 2024 :*